

MENGURAI KEKERASAN SIMBOLIK DIBALIK SERAGAM SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR : (PANDANGAN PIERRE BOURDIEU TENTANG HABITUS DALAM PENDIDIKAN)

Rahmad Mohulaingo¹, Samsi Pomalingo², Salma Halidu³, Candra Cuga⁴

^{1,2,3,4}Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo

Email: mohulaingorahmad@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :17-02-2025

Revised :02-03-2025

Accepted :07-03-2025

Keywords: Symbolic Violence, Habitus, Pierre Bourdieu, School Uniforms

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to analyze the existence of symbolic violence hidden behind the use of school uniforms at the elementary school level using Pierre Bourdieu's perspective, especially the concept of habitus in education. School uniforms, which are generally considered a tool to create equality and discipline, also turn out to be a medium of symbolic domination that reproduces social inequality. The approach to this research is a literature study with a descriptive-qualitative method, analyzing how school uniforms, as cultural symbols, contribute to the internalization of dominant values by students. The results of the study indicate that school uniforms function as a device that strengthens the legitimacy of certain social norms, creating the illusion of equality among students. However, differences in socio-economic background remain visible through additional attributes, such as the quality of uniform materials, cleanliness, and accessories, which reflect the economic capital of students' families. This causes students from less dominant social groups to often feel inadequate or unequal, internalizing their subordinate positions. Educational institutions reinforce this symbolic violence through strict rules governing the use of uniforms, making symbolic domination seem natural and legitimate. This study emphasizes the importance of examining symbols in education, such as uniforms, which are often considered neutral but actually function as tools of domination. By understanding the symbolic violence behind school uniforms, it is hoped that a more equitable education system can be built, which not only creates formal uniformity but also embraces inclusivity and social justice..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan kekerasan simbolik yang tersembunyi di balik penggunaan seragam sekolah di tingkat sekolah dasar dengan menggunakan perspektif Pierre Bourdieu, khususnya konsep habitus dalam pendidikan. Seragam sekolah, yang secara umum dianggap sebagai alat untuk menciptakan kesetaraan dan kedisiplinan, ternyata juga menjadi medium dominasi simbolik yang mereproduksi ketimpangan sosial. Pendekatan penelitian ini adalah studi pustaka dengan metode deskriptif-kualitatif, menganalisis bagaimana seragam sekolah, sebagai simbol budaya, berkontribusi pada internalisasi nilai-nilai dominan oleh siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seragam sekolah berfungsi sebagai perangkat yang memperkuat legitimasi norma sosial tertentu, menciptakan ilusi kesetaraan di antara siswa. Namun, perbedaan latar belakang sosial ekonomi tetap terlihat melalui atribut tambahan, seperti kualitas bahan seragam, kebersihan, dan aksesoris, yang mencerminkan modal ekonomi keluarga siswa. Hal ini menyebabkan siswa dari kelompok sosial yang kurang dominan sering kali merasa tidak mampu atau tidak setara, menginternalisasi posisi subordinat mereka. Institusi pendidikan memperkuat kekerasan simbolik ini melalui aturan ketat yang mengatur penggunaan seragam, menjadikan dominasi simbolik tersebut tampak alamiah dan sah. Penelitian ini menegaskan pentingnya memeriksa simbol-simbol dalam pendidikan, seperti seragam, yang sering kali dianggap netral namun sebenarnya berfungsi sebagai alat dominasi. Dengan memahami kekerasan simbolik di balik seragam sekolah, diharapkan dapat dibangun sistem pendidikan yang lebih adil, yang tidak hanya menciptakan keseragaman formal tetapi juga merangkul inklusivitas dan keadilan sosial.

PENDAHULUAN

Dewasa ini pendidikan di sekolah dasar harus senantiasa dikaitkan dengan pendidikan dasar, karena sekolah dasar merupakan bagian dari sistem (subordinasi) pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan dasar berdurasi 9 tahun yang diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di sekolah dasar (SD) dan 3 tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat. Sekolah dasar pada hakikatnya merupakan satuan atau unit lembaga sosial (*social institution*) yang diberi amanah atau tugas khusus (*specific task*) oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara sistematis (Taufiq, 2014). Pendidikan Sekolah Dasar sebagai suatu proses yang bukan hanya memberi bekal kemampuan intelektual dasar dalam membaca, menulis dan berhitung saja, melainkan juga sebagai proses mengembangkan kemampuan dasar peserta didik secara optimal dalam aspek intelektual, sosial, dan personal, untuk dapat melanjutkan pendidikan di SLTP atau yang sederajat.

Banyak aturan dan kebijakan yang dibuat oleh berbagai pihak yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan yang sering terjadi ditingkat satuan pendidikan. Salah satunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Terlepas dari pada peraturan yang mengikat tentang kekerasan, fenomena kekerasan yang telah banyak dikenal masyarakat dan telah sering menjadi pusat perhatian sebagian besar masyarakat. Kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan psikologis hanyalah bentuk kekerasan yang wujudnya "mudah dikenali" dan dampaknya juga mudah untuk diamati. Akan tetapi, banyak pihak yang tidak menyadari akan adanya bentuk kekerasan lain yang hampir selalu terjadi di lingkungan sekolah. Bentuk kekerasan tersebut adalah "Kekerasan Simbolik". Kekerasan Simbolik adalah bentuk kekerasan yang tidak langsung dan sering tidak disadari terjadi melalui simbol, bahasa, dan praktek budaya yang memperkuat ketidaksetaraan dan dominasi sosial. Kekerasan simbolik memang bukanlah sebuah kekerasan yang mudah dilihat wujudnya, namun sebenarnya bentuk kekerasan ini sangat mudah untuk diamati.

Permasalahan kekerasan simbolik ini, pertama kali diangkat ke dalam pemikiran pendidikan (dan sosiologi) oleh seorang sosiolog dari Prancis, Pierre Bourdieu. Ada beberapa konsep kunci untuk memahami pemikiran Bourdieu yang kemudian dikaitkan dengan konsep pendidikan dan sekolah. Diantaranya, 1) modal : sekumpulan sumber daya baik materi maupun non materi yang dimiliki seseorang atau kelompok tertentu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. 2) kelas : sebagai kumpulan agen yang menduduki posisi- posisi serupa dan ditempatkan dalam kondisi serupa serta ditundukan atau diarahkan pada pengondisian. 3) habitus : Habitus merupakan gaya hidup, nilai-nilai, watak, dan harapan kelompok sosial tertentu. 4) kekerasan dan kekuasaan: kekerasan merupakan pangkal atau hasil dari sebuah praktik kekuasaan. Pendidikan bagi Bourdieu, hanyalah sebuah alat untuk mempertahankan eksistensi kelas dominan. Sekolah pada dasarnya hanya menjalankan proses reproduksi budaya, sebuah mekanisme sekolah, dalam hubungannya dengan institusi yang lain, untuk membantu mengabadikan ketidaksetaraan ekonomi antar generasi (Giddens, 2006). Hubungan Pendidikan dan kekerasan simbolik sangat erat, dikarenakan pendidikan sering kali menjadi salah satu arena utama di mana kekerasan simbolik terjadi dan diperkuat. Bourdieu melihat pendidikan sebagai salah satu arena utama di mana kekerasan simbolik terjadi dan diperkuat (Ulya, 2016). Sistem pendidikan, dengan segala aturan, nilai, dan budaya yang ada di dalamnya, tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyebarkan pengetahuan akademik, tetapi juga sebagai institusi yang mereproduksi struktur sosial yang ada. Proses ini terjadi secara halus, tidak selalu tampak jelas, namun dampaknya sangat besar bagi individu, terutama dalam pembentukan identitas dan posisi sosial mereka.

Dalam memahami bagaimana kekerasan simbolik bekerja dalam pendidikan, Bourdieu menggunakan konsep modal dan habitus. Modal, dalam pandangan Bourdieu, merujuk pada berbagai jenis kekuatan atau sumber daya yang dimiliki individu, yang dapat berupa modal ekonomi, sosial, dan kultural. Modal ini sangat

menentukan bagaimana individu berinteraksi dengan dunia pendidikan dan seberapa besar mereka dapat berhasil dalam sistem pendidikan tersebut. Di sisi lain, habitus merujuk pada seperangkat disposisi atau kebiasaan yang terbentuk dalam diri individu melalui pengalaman hidup mereka, terutama pengalaman yang berkaitan dengan posisi sosial mereka.

Siswa dari keluarga dengan modal ekonomi dan sosial yang lebih besar, misalnya, sering kali memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan fasilitas yang lebih mendukung keberhasilan mereka. Mereka juga lebih mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan sistem pendidikan, yang sering kali mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berasal dari kelas sosial dominan. Sebaliknya, siswa dari keluarga dengan modal yang lebih terbatas sering kali kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan tersebut, baik karena keterbatasan materi, pengetahuan, atau bahkan keterampilan yang dianggap penting dalam pendidikan. Kekerasan simbolik bekerja di sini melalui cara-cara yang tidak terlihat, seperti cara guru memperlakukan siswa atau bagaimana norma-norma sosial dipraktikkan di dalam kelas, yang memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada.

Dampak kekerasan simbolik dalam pendidikan dapat sangat memengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial siswa. Ketika siswa merasa bahwa mereka tidak diterima atau dihargai dalam sistem pendidikan, baik karena perbedaan status sosial, bahasa, atau budaya, hal ini dapat merusak rasa percaya diri mereka. Mereka mungkin merasa tidak kompeten atau tidak layak berada di dalam sistem tersebut, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesehatan mental dan perkembangan pribadi mereka. Pendidikan, dalam hal ini, bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan atau keterampilan praktis, tetapi juga tentang bagaimana siswa mengembangkan identitas mereka dan merasa dihargai dalam masyarakat. Kekerasan simbolik yang terjadi di dalam pendidikan, terutama ketika siswa merasa terpinggirkan atau dihina karena latar belakang sosial mereka, dapat merusak kemampuan mereka untuk berkembang secara penuh, baik dalam konteks akademik maupun sosial.

Pendidikan dan kekerasan simbolik memiliki hubungan yang sangat erat, terutama dalam konteks teori Pierre Bourdieu. Sistem pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyebarkan pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat struktur sosial yang ada melalui berbagai norma dan simbol yang diterima secara luas. Kekerasan simbolik dalam pendidikan terjadi secara halus dan sering kali tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat besar, baik pada individu maupun pada masyarakat secara keseluruhan. Dalam rangka menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil, penting untuk memahami bagaimana kekerasan simbolik beroperasi dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat mengurangi dampaknya pada siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif non-empiris. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara keseluruhan

dan secara eksplisit, dengan menggunakan berbagai teknik alamiah dalam konteks alami (Moleong, 2017). Sebaliknya Penelitian kualitatif berfokus pada konteks dan kompleksitas dari fenomena, di mana peneliti terlibat langsung dalam interaksi dengan subjek penelitian untuk menggali data secara mendalam yang merupakan pengertian dari (Muhadjir, 1996). Penelitian bertujuan untuk memahami pemikiran Pierre Bourdieu mengenai kekerasan simbolik melalui seragam sekolah. Dalam penelitian ini, pengumpulan data tidak dilakukan melalui observasi dan wawancara, melainkan melalui sumber pustaka seperti buku, jurnal dan artikel. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang. Penulis juga menggunakan metode komperatif, yaitu peneliti berusaha menentukan penyebab dengan membandingkan berbagai literatur dan studi kasus yang berkaitan dengan kekerasan simbolik di lingkungan sekolah dasar dan wacana seragam sekolah minimalis. Penelitian ini menelaah berbagai perspektif dan hasil penelitian untuk mengidentifikasi pola umum dan variasi dalam manifestasi kekerasan simbolik serta implikasinya dalam konteks pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Simbolik Di Lingkungan Sekolah Dasar

Kekerasan simbolik adalah konsep yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu untuk menggambarkan cara-cara yang lebih halus dan tak terlihat dalam memperkuat ketidaksetaraan sosial melalui simbol, norma, dan praktik yang diterima secara luas dalam masyarakat (Martono, 2012). Dalam konteks pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah dasar, kekerasan simbolik tidak terjadi melalui kekerasan fisik atau paksaan yang eksplisit, melainkan melalui bentuk-bentuk kontrol sosial yang terinternalisasi dalam diri individu. Proses ini cenderung tersembunyi, tetapi memiliki dampak yang dalam dan bertahan lama pada pembentukan identitas dan posisi sosial siswa (Sholikin, 2020).

Bourdieu menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki akses ke berbagai jenis modal baik modal ekonomi, sosial, maupun budaya (Grenfell, 2008). Modal ini sangat menentukan bagaimana individu diperlakukan, bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri, dan bagaimana mereka diterima oleh kelompok lain. Dalam konteks sekolah dasar, kekerasan simbolik bekerja dalam berbagai bentuk yang membentuk perilaku dan identitas siswa tanpa disadari.

Seragam sekolah dasar sering kali dianggap sebagai simbol keseragaman, kedisiplinan, dan kesetaraan. Namun, dalam pandangan Bourdieu, seragam juga berfungsi sebagai alat yang memperkuat struktur sosial yang ada. Meskipun secara eksplisit tujuannya untuk menciptakan kesetaraan visual antara siswa, seragam justru berfungsi untuk memisahkan berdasarkan status sosial dan ekonomi. Siswa yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi rendah mungkin tidak bisa memiliki seragam yang terawat baik, sementara siswa dari keluarga dengan

kemampuan lebih tinggi dapat membeli seragam baru atau lebih rapi. Ketimpangan ini menjadi lebih mencolok meskipun semua siswa mengenakan seragam yang sama.

Seragam sekolah, dalam hal ini, menciptakan tekanan psikologis yang tidak terlihat pada siswa. Mereka yang seragamnya sudah usang atau tidak sesuai dengan standar dapat merasa rendah diri, yang mengarah pada perasaan ketidaksetaraan sosial yang lebih dalam. Bourdieu menyebut ini sebagai kekerasan simbolik, di mana struktur sosial yang ada disebarkan melalui simbol-simbol yang diinternalisasi oleh individu tanpa mereka sadari.

Selain seragam, guru juga memainkan peran penting dalam menciptakan dan menguatkan kekerasan simbolik di sekolah dasar. Bourdieu menekankan bahwa guru bukan hanya berperan sebagai pendidik yang mengajarkan pengetahuan, tetapi juga sebagai agen yang memperkenalkan dan menegakkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat (James, 1998). Dalam banyak kasus, guru sering kali tanpa sadar memperkuat perbedaan kelas sosial dengan cara mereka memperlakukan siswa.

Seragam Sekolah Sekolah Dasar Dalam Pandangan Pierre Bourdieu

Seragam sekolah di tingkat dasar, meskipun tampaknya menjadi simbol keseragaman dan kedisiplinan, dapat dianalisis lebih dalam melalui perspektif teori sosial Pierre Bourdieu. Dalam pandangannya, seragam sekolah tidak sekadar menjadi alat identifikasi atau cara untuk menyamakan siswa, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kekerasan simbolik yang berfungsi untuk mereproduksi struktur sosial dan hierarki yang ada (Seftiya Nur Faridah, 2018). Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat konsep-konsep kunci dalam teori Bourdieu, seperti habitus, modal, dan kekerasan simbolik, serta bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam konteks seragam sekolah di sekolah dasar.

Habitus, menurut Bourdieu, adalah seperangkat disposisi yang diperoleh individu melalui pengalaman hidup dan sosialnya (Murphy, 2015). Habitus ini, yang terinternalisasi dalam diri individu, memengaruhi cara mereka berpikir, bertindak, dan merasakan. Dalam konteks pendidikan, habitus dapat mencakup cara siswa merespons aturan sekolah, norma yang ada, serta cara mereka berinteraksi dengan teman sekelas dan guru. Seragam sekolah, sebagai bagian dari rutinitas sekolah yang ditetapkan secara sosial, berfungsi untuk membentuk habitus siswa, yaitu melalui pengalaman memakai seragam setiap hari, siswa terinternalisasi dalam kebiasaan yang mengikat mereka pada struktur yang lebih besar dalam masyarakat.

Seragam sekolah di tingkat dasar, dalam pandangan Bourdieu, bukan hanya sekadar pakaian yang dipakai untuk menciptakan keseragaman, tetapi juga menjadi alat yang membentuk habitus siswa. Dalam hal ini, seragam dapat dilihat sebagai simbol yang mengingatkan siswa pada posisi sosial mereka di dalam struktur pendidikan. Seragam menjadi indikator visual dari identitas sosial, dan karenanya, mempengaruhi bagaimana siswa melihat diri mereka sendiri dan bagaimana mereka dilihat oleh orang lain. Bourdieu berpendapat bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam pembentukan habitus ini, terutama dalam mendukung reproduksi struktur sosial yang ada. Seragam sekolah adalah bagian dari proses ini, karena ia

mengatur dan mengatur ulang identitas sosial siswa, sesuai dengan norma dan nilai yang ingin ditegakkan oleh sistem pendidikan.

Seragam sekolah, pada tingkat dasar, sering kali menunjukkan perbedaan status sosial antara siswa. Misalnya, meskipun semua siswa mungkin mengenakan seragam yang sama, perbedaan dalam kondisi fisik seragam seperti kekurangan atau kerusakan pada pakaian sering kali mengindikasikan perbedaan ekonomi di antara siswa. Kekerasan simbolik terjadi ketika siswa yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi rendah merasa malu atau inferior karena seragam mereka tampak lebih usang atau kurang terawat dibandingkan dengan siswa lain. Meskipun seragam itu sendiri dirancang untuk menciptakan kesetaraan, kenyataannya ia sering kali memperburuk ketidaksetaraan sosial dengan cara yang lebih subtil, yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh banyak orang.

Melalui seragam, sistem pendidikan memperkenalkan norma-norma sosial yang mengarahkan siswa untuk menerima hierarki sosial sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Siswa, tanpa disadari, belajar untuk menyesuaikan diri dengan struktur sosial yang ada, baik melalui pengaruh langsung dari guru, teman, atau bahkan keluarga. Dalam hal ini, seragam sekolah berfungsi sebagai bentuk kekerasan simbolik yang tidak hanya menandakan perbedaan status sosial tetapi juga memperkuat ketimpangan tersebut. Siswa yang berasal dari keluarga yang lebih kaya sering kali memiliki akses lebih baik ke sumber daya pendidikan, termasuk seragam yang lebih baik, yang semakin memperburuk ketimpangan tersebut.

Modal Sosial, Ekonomi, dan Kultural dalam Konteks Seragam Sekolah

Bourdieu mengembangkan konsep modal untuk menjelaskan berbagai bentuk kekuatan yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Modal ini dapat berupa modal ekonomi, sosial, dan kultural (Martono, 2012). Modal ekonomi merujuk pada sumber daya finansial yang dimiliki individu, modal sosial berkaitan dengan jaringan hubungan yang dimiliki individu, dan modal kultural mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan budaya yang dihargai dalam masyarakat.

Seragam sekolah dapat dilihat sebagai manifestasi dari modal sosial dan kultural yang dimiliki oleh individu. Siswa yang datang dari keluarga dengan modal ekonomi yang lebih tinggi mungkin dapat membeli seragam yang lebih mahal, lebih rapi, dan lebih baru, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesan bahwa mereka berasal dari keluarga yang lebih mampu. Sementara itu, siswa dari keluarga dengan modal ekonomi rendah mungkin tidak memiliki akses yang sama, yang dapat menandakan status sosial mereka yang lebih rendah. Dalam konteks ini, seragam tidak hanya berfungsi sebagai alat keseragaman tetapi juga menjadi simbol status dan kekuatan yang mencerminkan modal sosial dan ekonomi individu.

Modal kultural juga berperan penting dalam pembentukan habitus melalui seragam sekolah. Di banyak masyarakat, seragam sekolah bukan hanya tentang pakaian, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan pendidikan yang dihargai. Siswa yang mengenakan seragam dengan cara yang sesuai dengan norma yang ada sering kali dianggap lebih disiplin dan lebih mampu mengelola diri mereka, sedangkan siswa yang tampak tidak mematuhi aturan seragam dapat dianggap

sebagai pelanggar norma atau tidak patuh terhadap sistem pendidikan. Dalam hal ini, seragam berfungsi sebagai penanda yang menunjukkan sejauh mana siswa dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya dan aturan yang ada.

Reproduksi Sosial dan Seragam Sekolah

Menurut Bourdieu, sistem pendidikan memiliki fungsi penting dalam reproduksi sosial (Webb et al., 2002). Pendidikan, baik secara formal maupun informal, sering kali tidak hanya mentransfer pengetahuan akademik, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang sudah ada. Dalam konteks seragam sekolah, reproduksi sosial ini tercermin dalam cara seragam menciptakan keseragaman visual yang menyembunyikan ketidaksetaraan yang ada. Pendidikan melalui seragam sekolah dapat memperkuat gagasan bahwa keseragaman adalah hal yang baik, sementara perbedaan dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang telah mapan.

Seragam sekolah, sebagai bagian dari sistem pendidikan, memainkan peran dalam mereproduksi struktur sosial dengan cara yang tidak disadari oleh banyak orang. Meskipun seragam dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan di antara siswa, pada kenyataannya ia sering kali memperkuat stratifikasi sosial yang sudah ada, baik itu berdasarkan kelas sosial, etnis, atau bahkan gaya hidup. Melalui seragam, anak-anak belajar bahwa keseragaman adalah cara untuk mendapatkan pengakuan sosial, sementara perbedaan dapat dilihat sebagai penyebab perpecahan atau ketidaksetaraan.

Untuk mengurangi dampak kekerasan simbolik yang dihasilkan oleh seragam sekolah, beberapa langkah dapat diambil. Salah satunya adalah dengan memberikan kebebasan yang lebih besar kepada siswa dalam memilih pakaian mereka, dengan mempertimbangkan status ekonomi dan sosial mereka. Misalnya, sekolah dapat memberikan subsidi untuk seragam bagi siswa dari keluarga dengan pendapatan rendah, atau menciptakan kebijakan yang memungkinkan siswa untuk mengenakan pakaian yang lebih pribadi dan mencerminkan identitas mereka, daripada memaksakan keseragaman yang kaku.

Pendidikan tentang kekerasan simbolik itu sendiri bisa menjadi langkah penting untuk mengurangi dampaknya. Guru dan siswa dapat diajarkan untuk menyadari bagaimana simbol-simbol sosial, seperti seragam, dapat berfungsi untuk memperkuat atau bahkan menciptakan ketimpangan sosial. Dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana struktur sosial bekerja, baik di dalam maupun di luar sekolah, kita dapat menciptakan kesadaran kritis yang dapat mengurangi dampak negatif dari kebijakan yang mengandalkan keseragaman sebagai cara untuk mengelola perbedaan.

Seragam sekolah di tingkat dasar, meskipun dirancang untuk menciptakan keseragaman dan kedisiplinan, ternyata memiliki dimensi yang lebih dalam yang berhubungan dengan kekerasan simbolik, habitus, dan reproduksi sosial. Dalam pandangan Pierre Bourdieu, seragam sekolah adalah alat yang digunakan untuk memperkuat struktur sosial yang ada dengan cara yang halus, namun efektif. Melalui seragam, siswa tidak hanya belajar tentang kedisiplinan dan norma sosial, tetapi juga

terpapar pada ketidaksetaraan sosial yang terwujud dalam cara mereka dipandang berdasarkan status ekonomi dan sosial mereka. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa seragam sekolah bukan hanya simbol keseragaman, tetapi juga bentuk kekuasaan simbolik yang mempengaruhi bagaimana siswa merasakan posisi sosial mereka di dunia pendidikan.

Mengurangi dampak kekerasan simbolik yang timbul dari penggunaan seragam di sekolah dasar memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kritis terhadap struktur sosial yang ada. Dengan memberikan kebebasan lebih kepada siswa dan menyadarkan mereka tentang ketidaksetaraan yang ada, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan setara. Sehingga, pendidikan dapat berfungsi tidak hanya sebagai agen reproduksi sosial, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Konsep Habitus Dari Pierre Bourdieu Dan Kekerasan Simbolik Di Sekolah

Pierre Bourdieu, seorang sosiolog terkemuka, memperkenalkan konsep habitus sebagai cara untuk memahami bagaimana struktur sosial memengaruhi perilaku individu. Habitus, menurut Bourdieu, adalah seperangkat disposisi yang tertanam dalam individu sejak dini, dibentuk oleh pengalaman sosial dan lingkungan mereka (Martono, 2012). Habitus tidak bersifat statis; ia adalah hasil dari interaksi dinamis antara individu dan struktur sosial, yang secara halus menentukan cara berpikir, berbicara, dan bertindak seseorang. Dalam konteks pendidikan, konsep ini membantu menjelaskan bagaimana norma dan nilai yang diajarkan di sekolah mereproduksi ketimpangan sosial.

Di sekolah dasar, habitus mulai terbentuk melalui interaksi anak-anak dengan institusi pendidikan. Sejak pertama kali masuk sekolah, anak-anak diperkenalkan pada serangkaian aturan, norma, dan nilai yang mencerminkan budaya dominan. Misalnya, cara berbicara yang dianggap sopan, tata krama, atau cara berpakaian sering kali mencerminkan nilai-nilai kelas sosial tertentu. Anak-anak dari latar belakang sosial yang berbeda mungkin merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan norma-norma ini, yang secara tidak sadar memperkuat posisi subordinat mereka dalam hierarki sosial. Habitus tidak hanya dibentuk oleh apa yang diajarkan di kelas, tetapi juga oleh praktik sehari-hari di sekolah. Kekerasan simbolik, konsep lain yang dikembangkan Bourdieu, berperan besar dalam proses ini. Kekerasan simbolik merujuk pada bentuk dominasi yang tidak terlihat, di mana nilai dan norma kelompok dominan dipaksakan kepada kelompok lain melalui simbol, bahasa, dan praktik sehari-hari. Di sekolah dasar, kekerasan simbolik bekerja secara halus tetapi efektif untuk mereproduksi ketimpangan sosial.

Salah satu contoh kekerasan simbolik di sekolah dasar adalah penggunaan bahasa standar dalam pembelajaran. Bahasa yang digunakan di sekolah sering kali mencerminkan modal budaya kelas dominan, yang mungkin berbeda dari bahasa sehari-hari yang digunakan oleh anak-anak dari keluarga pekerja atau komunitas minoritas. Ketika anak-anak ini kesulitan memahami atau menggunakan bahasa tersebut, mereka sering dianggap kurang cerdas atau kurang mampu, meskipun kenyataannya mereka hanya tidak memiliki akses yang sama terhadap modal budaya

tersebut. Kekerasan simbolik juga terlihat dalam cara sekolah memperlakukan perbedaan sosial-ekonomi di antara siswa. Misalnya, seragam sekolah, yang dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan, sebenarnya menjadi simbol yang mencerminkan perbedaan kelas sosial. Anak-anak dari keluarga kaya cenderung memiliki seragam yang lebih baru, rapi, dan bersih, sementara anak-anak dari keluarga miskin sering mengenakan seragam yang usang atau tidak sesuai standar. Hal ini menciptakan rasa malu atau inferioritas pada siswa dari latar belakang ekonomi rendah, yang secara tidak langsung menginternalisasi posisi mereka dalam hierarki sosial.

Guru, sebagai agen institusi pendidikan, juga memainkan peran penting dalam memperkuat kekerasan simbolik (Buchanan et al., 1993). Dalam banyak kasus, guru secara tidak sadar menilai siswa berdasarkan standar budaya dominan yang mereka anggap universal. Misalnya, siswa yang tidak memenuhi standar tertentu dalam disiplin atau prestasi sering kali dicap sebagai "nakal" atau "tidak kompeten." Penilaian ini mengabaikan fakta bahwa siswa dari latar belakang sosial yang berbeda mungkin menghadapi hambatan struktural yang memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi standar tersebut. Selain itu, buku pelajaran yang digunakan di sekolah dasar sering kali merepresentasikan budaya dan nilai-nilai kelompok dominan, sementara budaya dan pengalaman kelompok minoritas diabaikan. Anak-anak dari kelompok yang kurang terwakili jarang menemukan identitas mereka tercermin dalam materi pelajaran, yang membuat mereka merasa terpinggirkan atau kurang penting. Kekerasan simbolik dalam hal ini bekerja dengan cara membuat nilai-nilai dominan tampak sebagai norma universal, sehingga legitimasi kelompok dominan tetap terjaga.

Ritual dan aturan sekolah juga menjadi sarana untuk mereproduksi habitus tertentu. Upacara bendera, misalnya, tidak hanya bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme, tetapi juga memperkuat kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan yang sering kali mencerminkan nilai-nilai kelas dominan. Anak-anak yang gagal mematuhi aturan ini sering kali dihukum, yang secara tidak langsung mengajarkan mereka untuk menerima struktur kekuasaan tanpa mempertanyakan.

Kekerasan simbolik juga bekerja melalui sistem penghargaan dan hukuman di sekolah. Siswa yang berprestasi cenderung mendapatkan penghargaan, sementara mereka yang tidak memenuhi standar sering kali dihukum atau dipermalukan. Sistem ini memperkuat gagasan bahwa kesuksesan sepenuhnya bergantung pada usaha individu, tanpa memperhitungkan pengaruh struktur sosial. Dengan cara ini, sekolah mereproduksi ilusi meritokrasi, di mana ketimpangan sosial dianggap sebagai sesuatu yang alami dan wajar.

Pembagian kelas berdasarkan prestasi atau "kelas unggulan" juga mencerminkan kekerasan simbolik. Anak-anak dari keluarga dengan modal sosial dan budaya lebih tinggi cenderung mengisi kelas unggulan, sementara anak-anak dari keluarga kurang mampu sering terjebak di kelas reguler. Sistem ini tidak hanya menciptakan hierarki di antara siswa, tetapi juga memperkuat gagasan bahwa posisi sosial seseorang ditentukan oleh kemampuan individu semata. Kekerasan simbolik di

sekolah dasar juga memengaruhi hubungan antar siswa. Anak-anak sering kali menilai teman-teman mereka berdasarkan simbol-simbol sosial, seperti penampilan atau cara berbicara, yang mencerminkan latar belakang sosial mereka. Penilaian ini menciptakan eksklusi sosial, di mana anak-anak dari kelompok yang kurang dominan merasa tidak diterima atau tidak setara dengan teman-teman mereka.

Dalam pandangan Bourdieu, penting untuk memahami bahwa habitus dan kekerasan simbolik tidak bekerja secara terpisah. Habitus yang tertanam dalam individu sejak dini membentuk cara mereka merespons kekerasan simbolik, sementara kekerasan simbolik berfungsi untuk memperkuat habitus yang ada. Di sekolah dasar, proses ini menciptakan lingkaran setan di mana ketimpangan sosial direproduksi dari generasi ke generasi. Institusi pendidikan juga memiliki potensi untuk mengubah struktur sosial jika mampu mengatasi kekerasan simbolik dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Guru, misalnya, dapat memainkan peran penting dalam mengenali dan menghargai keragaman budaya siswa. Dengan mengadopsi pendekatan pembelajaran yang inklusif, mereka dapat membantu siswa dari berbagai latar belakang merasa dihargai dan didukung dalam proses belajar.

Kritik terhadap Teori Bourdieu

Pierre Bourdieu dikenal sebagai salah satu pemikir besar dalam sosiologi, terutama karena konsep-konsepnya yang mendalam seperti habitus, modal, dan kekerasan simbolik. Namun, meskipun teorinya sangat berpengaruh, sejumlah kritik telah diarahkan pada pendekatannya, khususnya terkait dengan kecenderungannya yang deterministik dan kurangnya perhatian terhadap resistensi individu. Banyak pengamat merasa bahwa pendekatan Bourdieu terlalu menekankan bagaimana struktur sosial membentuk individu, sementara mengabaikan kemampuan individu untuk melawan, menantang, atau beradaptasi dengan struktur tersebut.

Salah satu kritik utama terhadap Bourdieu adalah bahwa teorinya sering kali menempatkan individu sebagai subjek yang sepenuhnya ditentukan oleh habitus mereka. Habitus, yang dibentuk melalui pengalaman hidup dan posisi sosial seseorang, dianggap mengarahkan tindakan, pilihan, dan persepsi individu. Dalam pandangan ini, individu cenderung menjadi produk dari struktur sosial tanpa banyak ruang untuk kebebasan atau resistensi. Kritik ini menyoroti bahwa pandangan Bourdieu terkadang memberikan kesan bahwa manusia adalah agen pasif yang tunduk pada logika sosial, tanpa kapasitas untuk merumuskan tindakan yang melampaui habitus mereka.

Pendekatan deterministik ini sering dikritik karena mengabaikan dinamika yang lebih kompleks dari perilaku manusia. Banyak ahli berpendapat bahwa individu tidak selalu bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh habitus mereka. Ada situasi di mana individu mampu menolak, menegosiasikan, atau bahkan melampaui batasan yang diberikan oleh struktur sosial. Resistensi semacam ini sering terjadi dalam konteks perubahan sosial, ketika individu atau kelompok melawan norma dan nilai yang mereka rasa tidak adil. Bourdieu, dalam banyak karyanya, dianggap kurang memberikan perhatian pada bentuk-bentuk resistensi semacam ini.

Pendekatan Bourdieu sering kali dianggap terlalu fokus pada reproduksi sosial, sehingga mengabaikan dinamika perubahan sosial. Dalam banyak kasus, individu atau kelompok mampu menentang struktur sosial yang ada dan menciptakan perubahan yang signifikan. Misalnya, gerakan sosial sering kali menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok marginal mampu menantang kekuasaan simbolik dan membentuk ulang norma-norma sosial. Dalam pandangan Bourdieu, perubahan ini mungkin sulit dijelaskan karena teorinya lebih menekankan pada stabilitas dan kontinuitas struktur sosial. Kritik lain yang muncul adalah bahwa pendekatan Bourdieu sering kali mengabaikan peran agensi individu dalam membentuk struktur sosial. Dalam teorinya, struktur sosial cenderung diperlakukan sebagai kekuatan yang mendominasi, sementara individu dianggap hanya sebagai penerima dari pengaruh tersebut. Namun, banyak ahli berpendapat bahwa struktur sosial sebenarnya merupakan hasil dari tindakan individu yang berulang-ulang. Dengan kata lain, individu tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial, tetapi juga memiliki peran aktif dalam menciptakan dan mengubahnya.

Pendekatan Bourdieu terhadap kekuasaan simbolik juga dikritik karena terlalu menekankan pada dominasi tanpa memberikan perhatian yang cukup pada resistensi simbolik. Meskipun kekuasaan simbolik bekerja dengan cara membuat dominasi tampak alami dan sah, ada banyak kasus di mana individu atau kelompok mampu menentang kekuasaan ini melalui penggunaan simbol-simbol alternatif. Contohnya adalah gerakan seni atau budaya yang sering kali berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap norma-norma dominan. Dalam hal ini, teori Bourdieu dianggap kurang fleksibel dalam menjelaskan dinamika perlawanan simbolik. Teori Bourdieu sering kali terlalu fokus pada konteks masyarakat Prancis, sehingga kurang mampu menangkap dinamika sosial yang berbeda di luar konteks tersebut. Pendekatannya terhadap habitus dan reproduksi sosial, misalnya, mungkin tidak sepenuhnya relevan dalam masyarakat dengan tingkat mobilitas sosial yang lebih tinggi atau dengan struktur sosial yang lebih cair. Dalam hal ini, teori Bourdieu dianggap kurang universal dan memerlukan adaptasi untuk diterapkan dalam konteks yang berbeda.

Dalam menghadapi kritik ini, beberapa pengamat telah mencoba mengintegrasikan pandangan Bourdieu dengan teori-teori lain yang lebih menekankan pada agensi dan resistensi individu. Misalnya, teori strukturasi dari Anthony Giddens menawarkan perspektif yang lebih seimbang antara struktur dan agensi, yang dapat melengkapi pendekatan Bourdieu. Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara individu dan struktur sosial.

Kritik terhadap teori Bourdieu menunjukkan pentingnya mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan dinamis dalam sosiologi. Pendekatan ini harus mampu menangkap kompleksitas hubungan sosial, termasuk kemampuan individu untuk melawan dan mengubah struktur sosial. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan teori sosial yang tidak hanya menganalisis reproduksi sosial, tetapi juga potensi untuk transformasi sosial. Meskipun teori Bourdieu memiliki kelemahan, kontribusinya terhadap sosiologi tetap tak terbantahkan. Konsep-konsepnya telah

membuka jalan bagi diskusi yang lebih luas tentang bagaimana struktur sosial bekerja dan bagaimana kita dapat memahami hubungan antara kekuasaan, budaya, dan individu. Kritik terhadap teorinya tidak hanya menunjukkan keterbatasannya, tetapi juga memberikan peluang untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif.

KESIMPULAN

Kajian tentang kekerasan simbolik dibalik seragam sekolah di sekolah dasar, dengan mengacu pada pandangan Pierre Bourdieu tentang habitus dalam pendidikan, menunjukkan bahwa seragam sekolah tidak hanya menjadi alat yang digunakan untuk menciptakan keseragaman, tetapi juga menjadi medium kekuasaan simbolik. Seragam, dalam konteks ini, merepresentasikan norma dan nilai yang dipaksakan oleh kelompok dominan dalam sistem pendidikan. Alih-alih menghapuskan perbedaan sosial, seragam kerap mereproduksi ketimpangan sosial dengan cara yang halus tetapi efektif. Hal ini terlihat dari bagaimana seragam dapat mencerminkan perbedaan status ekonomi, kebudayaan, dan modal sosial siswa, yang sering kali berdampak pada pembentukan habitus mereka.

Habitus yang tercipta melalui pengenaan seragam tidak lepas dari pengaruh struktur sosial yang lebih luas. Seragam menciptakan kerangka disposisi tertentu yang menginternalisasi nilai-nilai disiplin, hierarki, dan kepatuhan terhadap norma-norma dominan. Proses ini memperkuat posisi subordinat siswa yang berasal dari kelompok marjinal dan mereproduksi struktur sosial yang ada. Dalam hal ini, sekolah dasar, melalui praktik-praktik seperti penggunaan seragam, berfungsi sebagai agen reproduksi sosial yang mendukung keberlanjutan kekuasaan simbolik. Meskipun kekerasan simbolik ini bekerja secara sistemik, terdapat peluang untuk mendekonstruksi dan mengatasi dampaknya. Oleh karena itu, saran utama dari kajian ini adalah perlunya reformasi dalam pendekatan institusi pendidikan terhadap penggunaan seragam sekolah. Seragam seharusnya tidak lagi menjadi alat yang memperkuat hierarki sosial, tetapi menjadi simbol kesetaraan yang benar-benar inklusif. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, sekolah perlu memberikan fleksibilitas dalam kebijakan seragam agar dapat mencerminkan keragaman budaya, ekonomi, dan identitas siswa.

Dengan memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan identitas mereka, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mengurangi tekanan simbolik terhadap siswa dari latar belakang yang berbeda. Kedua, institusi pendidikan harus mengedepankan kesadaran kritis di antara guru dan siswa tentang bagaimana norma-norma yang tampak sederhana, seperti penggunaan seragam, sebenarnya mencerminkan dan mereproduksi ketimpangan sosial. Pengambil kebijakan perlu merancang sistem subsidi atau bantuan seragam untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa dapat memiliki akses yang setara terhadap pakaian sekolah yang layak tanpa rasa malu atau inferioritas. Pendekatan ini tidak hanya akan mengurangi beban ekonomi bagi siswa yang kurang mampu, tetapi juga akan menciptakan rasa kesetaraan di antara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchanan, I., Bourdieu, P., Raymond, G., & Adamson, M. (1993). Language and Symbolic Power. *SubStance*, 22(2/3), 342. <https://doi.org/10.2307/3685295>
- Giddens, A. (2006). *Sociology*. USA: Polity Press
- Grenfell, M. (2008). Pierre bourdieu. In *Pierre Bourdieu*. MPG Books Group.
- James, M. G. and D. (1998). *Acts of Practical Theory Bourdieu and Education* (C. Archer (ed.)). UK Falmer Press, 1Gunpowder.
- Martono, N. (2012). *Kekerasan Simbolik Di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Perpustakaan STIK
- Murphy, C. C. and M. (2015). *BOURDIEU, HABITUS AND SOCIAL RESEARCH THE ART OF APPLICATION*. PALGRAVE MACMILLAN. <https://doi.org/10.1057/9781137496928>
- Seftiya Nur Faridah. (2018). *KEKERASAN SIMBOLIK DI SEKOLAH (Studi di SD Negeri Pucangro Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan) Seftiya*. 6.
- Sholikin, N. I. F. dan A. (2020). Pierre Bourdieu Dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 41–60. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.1899>
- Taufiq, A. (2014). Hakikat pendidikan di Sekolah Dasar. In *Pendidikan Anak di SD* (Vol. 1, Issue 1). <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PDGK4403-M1.pdf>
- Ulya. (2016). Mewaspada Kekerasan Simbolik Dalam Relasi Orang Tua Dan Anak. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 9(2), 20. <https://doi.org/10.21043/palastren.v9i2.2050>
- Webb, J., Schirato, T., & Danaher, G. (2002). Understanding Bourdieu (Series: Cultural Studies). In R. F. and T. Threadgold (Ed.), *Allen&Unwin*. SRM Production Services, SDN, BHD, Malaysia.